

PENGARUH PAJAK DAERAH, INFLASI DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

Andi Asdiana Natsir^{*1}, Sylvia², Syarifuddin Kitta³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}asdianaandi08@gmail.com, ²sylvia@stienobel-indonesia.ac.id, ³syarifuddin_k@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, Inflasi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Selanjutnya, untuk pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R^2 atau R Square sebesar 0,913. Hasil ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 91,3%, dan sisanya 8,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kata Kunci: Pajak, Inflasi, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of local taxes, inflation and regional wealth management results separated from local revenue. The research approach used in this research is descriptive quantitative. This research was carried out at the Regional Financial and Asset Agency of Maros Regency. The type of data used in this research is quantitative data, while the data source uses secondary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study indicate that partially Regional Taxes and Results of Separated Regional Wealth Management have a positive and significant effect on Regional Original Income. In contrast, Inflation has a negative and significant effect on the Regional Original Income of Maros Regency. Furthermore, for simultaneous testing, it shows that Regional Taxes, Inflation and Results of Separated Regional Wealth Management have a positive and significant effect on the Regional Original Income of Maros Regency. This study produces a coefficient of determination of R^2 or R Square of 0.913. This result means that the variables of Local Taxes, Inflation and Separated Regional Wealth Management Results are related to Regional Original Income of 91.3%. Other causes outside the model explain the remaining 8.7%.

Keywords: Taxes, Inflation, Regional Wealth Management, Local Own Revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota/kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah

suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, harus mempunyai sumber keuangan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lainlain pendapatan daerah yang sah. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pembangunan daerah diharapkan agar tidak hanya bersifat di daerah perkotaan tetapi harus mencakup keseluruhan suatu daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Selama ini pembangunan yang berjalan hanya terjadi di pusat saja sedangkan pembangunan di daerah hampir tidak ada. Hal ini disebabkan dana yang sebenarnya untuk pembangunan daerah untuk hampir seluruhnya disetor ke pusat sehingga terjadi ketidakseimbangan pembangunan. Dengan demikian tergantung pada pusat dalam pembiayaan pembangunan.

Suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung dalam melaksanakan tugas dan pembangunan, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karenatanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Maros yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Maros berusaha untuk meningkatkan PAD melalui sumber-sumber PAD nya yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya.

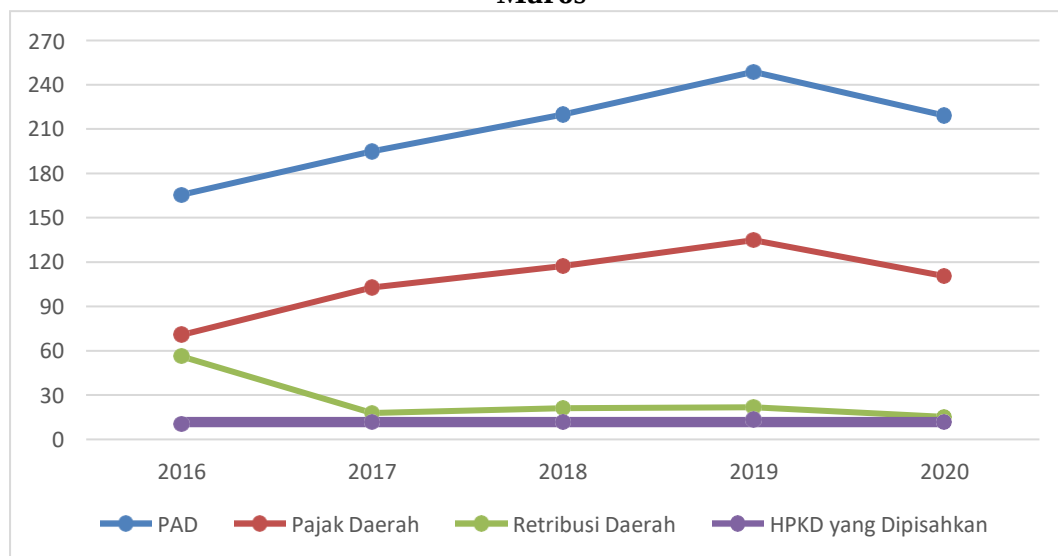
Tabel 1. Perkembangan Realisasi PAD (dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD		Pajak Daerah		Retribusi Daerah		HPKD yang Dipisahkan	
	Jumlah	Growth	Jumlah	Growth	Jumlah	Growth	Jumlah	Growth
2015	141,49	0	64,9		50,62		6,27	
2016	165,49	16,96%	70,68	8,91%	56,15	10,92%	10,31	64,43%
2017	195	17,83%	102,81	45,46%	17,84	-68,23%	11,53	11,83%
2018	219,81	12,72%	117,38	14,17%	21,05	17,99%	11,52	-0,09%
2019	248,75	13,17%	134,89	14,92%	21,82	3,66%	13,26	15,10%
2020	219,1	-11,92%	110,72	-17,92%	15,24	-30,16%	11,91	-10,18%

Sumber : Portal Data SIKD (djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terlihat terjadi penurunan sebesar 11,92% dari tahun sebelumnya yang kemudian juga diikuti oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya yakni, pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian selanjutnya, untuk melihat arah pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Maros selama tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan PAD dan Sumber-sumber PAD Kabupaten Maros



Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa arah pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros hanya diikuti oleh penerimaan pajak daerah yang terlihat mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terlihat masih fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih kecil kontribusinya

terhadap pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros sangat bergantung pada penerimaan pajak daerahnya.

Pada prinsipnya terdapat kaitan erat antara pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana semakin tinggi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterahkan masyarakat. Dengan demikian sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Maros seperti pajak daerah terutama khususnya retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi potensi yang dimilikinya.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut sifat pelaksanaannya, pajak daerah berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tidak memberikan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan, sedangkan retribusi daerah balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Menurut sifat pelaksanaannya, retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu untuk orang yang menikmati jasa.

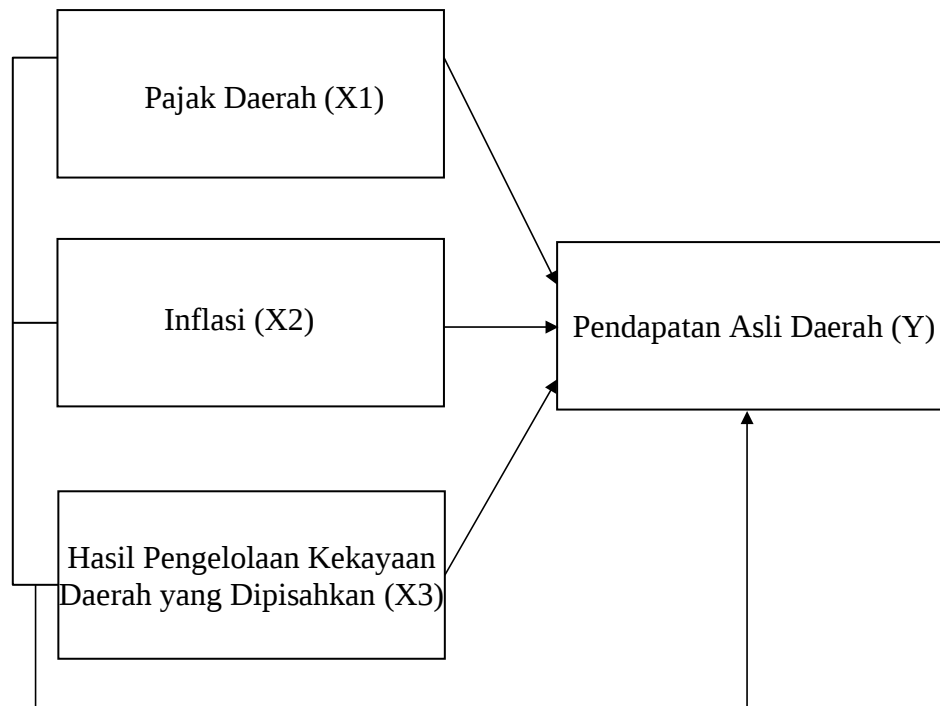
Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2016). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Penelitian Simanjuntak dalam Halim (2012) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap.

Selain pajak daerah dan inflasi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari setiap daerah juga menjadi salah satu penerimaan PAD. Walaupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih terhitung kecil pengaruhnya terhadap PAD dan tidak sebanyak penerimaan dari pajak, namun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memperlihatkan bagaimana suatu daerah mengukur kemampuan daerahnya dalam membangun potensi PAD di luar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat beberapa hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
2. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
4. Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam pelaksanaannya menggunakan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya yang dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji keberlakuan teori tersebut. Kemudian dijabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan peneliti arahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2018).

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Maros, namun untuk kepentingan pengumpulan data dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang beralamat di Jl. Asoka No.5, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (*scoring*). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara matematis atau teknik statistik. Sedangkan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu berupa dokumen Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, untuk data tingkat inflasi bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS for Windows versi 25. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasil analisis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,351	1,422		3,764	,000
	X1 (Pajak Daerah)	,505	,058	,603	8,726	,000
	X2 (Inflasi)	-,279	,159	-,103	-1,756	,084
	X3 (HPKD yang Dipisahkan)	,379	,062	,423	6,123	,000

Sumber: Output SPSS 25

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,351 + 0,505 X_1 - 0,279 X_2 + 0,379 X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda diatas dapat interprestasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5,351 (positif) artinya, jika variabel bebas, yaitu Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nilainya tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 5,351 satuan.
2. Nilai koefisien variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 0,505 artinya jika Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,505 satuan. Koefisien bernilai positif artinyaterdapat hubungan searah antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.
3. Nilai koefisien variabel Inflasi (X2) adalah sebesar -0,279 artinya jikavariabel Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan AsliDaerah akan menurun

sebesar 0,279 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terdapat hubungan tidak searah antara Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah.

4. Nilai koefisien variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) adalah sebesar 0,379 artinya jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat sebesar 0,379satuan. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan searah antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Uji T (Secara Parsial)

Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t-statistik dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil t-tabel = 1,996. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel Pajak Daerah (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 8.726. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($8.726 > 2,002$) maka dapat t-tabel -2,002 t-tabel 2,002 disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
2. Pada variabel Inflasi (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar -1.756. Artinya (-)t-hitung lebih besar dari (-)t-tabel ($-1.756 > -2,002$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, variabel independen Inflasi (X2)secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
3. Pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.026. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($6.123 > 2,002$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji F (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Jika F-hitung > F-tabel dengan signifikan < 0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan dan begitupun sebaliknya jika Fhitung < Ftabel dapat dinyatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Besarnya nilai F-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$, pada tabel f statistik diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,766. Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,110	3	1,703	78,963	,000 ^b
	Residual	1,208	56	,022		
	Total	6,318	59			
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)						
b. Predictors: (Constant), HPKD yang Dipisahkan (X3), Inflasi (X2), Pajak Daerah (X1)						

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4. diketahui nilai F-hitung sebesar 78,963 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($78,963 > 2,766$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,00 < 0,05$). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen menjadi sangat terbatas.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,899 ^a	,809	,799	,14687	1,883
a. Predictors: (Constant), HPKD yang Dipisahkan (X3), Inflasi (X2), Pajak Daerah (X1)					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)					

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien determinasi R^2 atau *R Square* adalah sebesar 0,809. Hasil ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah (X1), Inflasi (X2) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 80,9%, dan sisanya 19,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Pajak Daerah mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Pajak Daerah dimana telah diperoleh t- hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Maros. Hal ini mengandung makna bahwa pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Dengan diberikannya pemerintah daerah wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dalam mengatur aktivitas ekonomi, maka pemerintah daerah Kabupaten Maros dapat dikatakan telah memiliki kemampuan untuk mengelola pajak daerahnya untuk mendukung pengeluaran mereka. Dengan demikian, dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, pajak daerah ini menjadi faktor yang sangat penting, dimana pajak daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Sato dan Shinji dalam Sudarmana dan Sudiarta (2020) bahwa Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020) menyatakan bahwa variabel pajak daerah mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian Sudarmana dan Sudiarta (2020) juga menemukan hasil yang sama bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh yang searah atau positif terhadap PAD artinya semakin tinggi Pajak daerah, maka semakin besar Peningkatan PAD.

Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Inflasi mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun. Koefisien bernilai negatif artinya terdapat hubungan tidak searah antara Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Inflasi dimana diperoleh $(-t)$ -hitung lebih besar dari $(-t)$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Maros. Hal ini memiliki arti bahwa ketika terjadi inflasi, pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk. Harga barang yang naik secara terus menerus membuat masyarakat tidak mampu untuk membayar pajak yang dikenakan pemerintah karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa, dimana hal tersebut tentunya akan berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Mankiw (2016) bahwa inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah. Seluruh pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik) dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum

lansia). Sementara itu, Oktiani dan Muhariah (2021) juga berpendapat sama bahwa adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas perekonomian didalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Menurut Abdullah dan Halim (2013), inflasi menekankan pada pengaruh kenaikan upah terhadap jumlah uang beredar sebagai penyebab utamanya, dan biasanya dikatakan terdapat dua jalur antara jumlah uang beredar atau inflasi karena kelebihan Pasokan uang. Tingkat inflasi yang besar sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, jika tingkat inflasi tinggi maka akan mempengaruhi daya beli konsumen. Inflasi juga dapat memengaruhi peningkatan PAD, yang penentuannya didasarkan pada omset penjualan, seperti pajak hotel dan pajak restoran. Ketika inflasi tinggi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil bergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja dan sebaliknya ketika inflasi menurun, pelaku bisnis cenderung menaikkan harga yang membuat nilai upah riil turun.

Perkembangan inflasi saat ini sangat dominan dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dari peningkatan konsumsi masyarakat. Naiknyainflasi mempengaruhi pemungutan pajak melalui pengurangan konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga pendapatan produsen komersial turun, kontribusi pajak dari berbagai sektor seperti hiburan, hotel dan restoran juga akan berkurang, dengan demikian pengaruh inflasi menunjukkan dampak negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun upaya yang pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam dua cara. Pertama, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. Kedua, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Dari itulah pemerintah dapat memperoleh besaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Maka hubungan adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daffa dan Soeroso (2022) bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu, peningkatan variabel inflasi akan menurunkan pendapatan asli daerah. Penelitian lain oleh Kusuma (2014) juga menunjukkan hasil yang sama yakni, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di 33 Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Maros. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa, pemerintah Kabupaten Maros sejauh ini sudah cukup baik dalam menggali potensi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pembagian laba atas penyertaan modal dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya sehingga dapat meningkatkan pemasukan daerah. Dengan demikian, semakin besarnya penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Hafandi dan Romandhon (2020) bahwa adanya perusahaan milik daerah atau swasta yang ada pada wilayah pemerintahan suatu daerah tentu akan menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah untuk program-program pembangunan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pendapatan yang termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat. Dengan adanya perusahaan milik daerah dan sejumlah perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini tentu menjadi potensi yang dapat mengoptimalkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kireina dan Octaviani (2021) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tahun 2016-2019. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Mulyani dan Ramdini (2021) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Majalengka periode 2017-2019.

Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

Dengan demikian, perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata artinya semakin tinggi pajak daerah, maka semakin besar pendapatan asli daerah. Sedangkan jika terjadi inflasi, pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk, karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa, dimana hal tersebut tentunya akan berdampak pada pendapatan asli daerah.

Kemudian, apabila pembagian laba atas penyertaan modal dengan perusahaan-

perusahaan yang ada di daerah dapat tergali dengan optimal maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan maksimal. sehingga, semakin besarnya penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah

Adapun hasil koefisien regresi beta dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki nilai yang kontribusinya paling kecil diantara variabel independen lainnya. Sedangkan, untuk variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nilai kontribusi yang dimilikinya lebih besar dari variabel Inflasi, namun lebih kecil dari variabel Pajak Daerah. Dan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan bahwa nilai kontribusi yang dimilikinya paling besar diantara variabel independen lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun perolehan nilai hasil uji koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,9%, dan sisanya 19,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi penerimaan pajak daerah yang diperoleh, maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
2. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi yang terjadi, maka dapat menyebabkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros semakin menurun.
3. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.
4. Variabel Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan pemasukan dari pajak daerah, menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi inflasi dan mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik . Jakarta. Erlangga.
- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,

4(4).

- Fahmi, Irham. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung. Alfabeta.
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Iskandar, P. (2013). Economics Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi kelima. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Koton, Y. P. (2019). Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Deepublish.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. 5(1).
- Kusumawardhani, I. (2012). Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 9(1), 41-54.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 9(2), 107-124.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182.
- Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2017). Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam

- Penelitian. Cetakan Ketiga. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Murhadi, Werner R. (2013). Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Niode, Audie O. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Thesis. Ekonomi Pembangunan. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Edisi Pertama. Kencana.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A.(2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-2. Jakarta. Salemba Empat.
- Nurhikmah, N., Said, M., & Firman, A. (2023). RETRIBUTION INCREASING STRATEGY HOUSEHOLD WASTE. Proceeding of Research and Civil Society Desemination, 1(1), 83–94. Retrieved from <https://prosiding.nobel.ac.id/index.php/preced/article/view/18>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri, E. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2015). Teori Ekonomi Makro Suatu. Pengantar Edisi Ke-4. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Rianto, R. B. (2013). Manajemen Risiko. Jakarta. Salemba Empat.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 705-719.
- Saputro, E. A., & Mahmud, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).

- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. 8(8).
- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Sopian, D., & Rahayu, W. P. (2017). Pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap financial distress (studi empiris pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2).
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 175-187.
- Sugiyono, F. X. (2017). Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka (Vol. 10). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1(7). 81-92.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Isbela, P. D. (2018). Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 91-105.
- Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.